

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA YOGYAKARTA

Telaah DIBUKA!
PENDAFTARAN KEDOKTERAN GELOMBANG

Batas Pendaftaran: **22 Juli 2024** pukul 23:59 WIB

JADWAL SELEKSI

- 23 Juli: Batas Pengumpulan Berkas (maksimal pada pukul 12:00 WIB)
- 25 Juli: Tes Kesehatan & MMPI 2 (dilakukan di rumah sakit Betrososa)
- 26 Juli: Tes Bahasa Inggris & Tes CBT
- 27 Juli: Wawancara bersama Prodi Kedokteran UKDW
- 29 Juli: Pengumuman

Daftar di sini: pmb.ukdw.ac.id

Muhammadiyah

Muhammadiyah menegaskan komitmen, pandangan dan kiprah perjuangan organisasi. "Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang kehadirannya mengedepankan risalah Islam, berkemajuan dalam menghadapi kehidupan pada berbagai bidang dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemashalatan dan tercegahnya kemudaratn bagi hajat hidup bangsa," ujarnya.

Guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini mengatakan, Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Berkemajuan terus bergerak demi tegaknya keadaban, perdamaian, kesejahteraan, persatuan, keadilan, kebaikan dan kemajuan dalam kehidupan bangsa Indonesia maupun di ranah global yang rahmatan lil-'alamin.

"Muhammadiyah senantiasa prokehidupan dan tidak antikehidupan dalam segala lapangan untuk terwujudnya NKRI yang *baladatum thayyibatun warabbun ghafur*," tegasnya.

Menurut Haedar, Muhammadiyah seba-

gai organisasi kemasyarakatan yang besar dan terpercaya terus bergerak dalam memajukan kehidupan bangsa di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan aspek kehidupan lainnya sebagai wujud penghidmatannya yang tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia.

"Muhammadiyah sesuai kepribadiannya senantiasa aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud Islam dan pembangunan, yakni *beramar makruf nahi munkar* disertai contoh teladan yang baik serta bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana," ujarnya.

Anggota Kehormatan Ikatan Sosiologi Indonesia ini menyebutkan, Muhammadiyah selalu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah dalam bingkai 'Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyadah'.

Muhammadiyah, lanjutnya, senantiasa memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhawah Islamiyah disertai sikap lapang

dada dan luas pandangan dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode ini mengajak seluruh pihak di tubuh pemerintahan, kekuatan politik nasional dan lembaga-lembaga strategis lainnya agar mengedepankan aktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila, konstitusi dan etika luhur untuk tegaknya persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam kehidupan nyata disertai keteladanan utama para elitnya.

"Jauhi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan perusakan segala aspek kehidupan demi kelangsungan hidup generasi bangsa dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Ia juga mengajak seluruh pihak yang bergerak dalam dunia media massa, baik cetak, elektronik/digital maupun media sosial untuk menjunjung tinggi keadaban atau etika luhur, ilmu pengetahuan, pencerdasan, persatuan, perdamaian, keutuhan dan kemajuan kehidupan bangsa.

Sambungan hal 1

Rencanakan

waktunya menjadi lebih cukup untuk mempersiapkan layanan secara lebih baik. Ada kepastian penggunaan, ada kepastian kerja sama dan ini nanti kita jajaki bersama ke depan," tambah Hilman.

Selain kontrak jangka panjang, pertemuan tersebut juga membahas kesediaan tempat di Armuzna serta skenario-skenario baru yang dapat dikembangkan.

"Kita diskusikan juga mengenai tempat, terkait kesediaan dan kepastian tempat pada saat Armuzna serta skenario baru yang bisa dijalankan, dikembangkan dan diperkuat oleh misi haji, termasuk Indonesia," jelas Hilman.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Abdul Fattah Masyath atas dukungan yang diberikan kepada misi haji Indonesia selama penyelenggaraan haji 1445 H.

Diskusi tersebut juga mencakup beberapa regulasi yang telah dijalankan serta perubahan regulasi tentang haji yang sedang dirumuskan.

Wamenhaj Arab Saudi mengapresiasi kesuksesan pelaksanaan *murur* di



KR-Media Center Haji
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief saat bertemu Wamenag Haji Arab Saudi Abdul Fattah Masyath.

Armuzna oleh misi haji Indonesia. Hilman Latief menyatakan, ke depan, PPIH akan merumuskan skenario baru untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah dalam menjalani ibadah. Misalnya, tanazul yang terorganisir dengan baik dan lebih siap.

Dalam pertemuan itu, Wamenhaj juga mengapresiasi upaya Indonesia dalam menekan angka kematian jemaah. Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, hingga saat ini, terdapat 329 jemaah wafat. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 586 pada rentang operasional yang sama.

Hilman menekankan pentingnya memperkuat skema *istitha'ah* kesehatan sebelum jemaah haji melakukan penulanan.

"Kita berharap ke depan bisa lebih rendah lagi. Ini bahan evaluasi kita juga dalam memperkuat skema *istitha'ah* jemaah," katanya.

Rencana kontrak jangka panjang dalam penyelenggaraan haji ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Dengan persiapan yang lebih matang dan kerja sama yang lebih erat, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir.

Sambungan hal 1

Disbud

"Dari 20 karya dongeng yang masuk diseleksi/dikurasi dan dihasilkan lima karya yang ditampilkan," katanya.

Dian mengatakan, mendongeng memuat banyak nilai-nilai kebaikan yang akan ditularkan kepada anak-anak. Nilai-nilai kebaikan tersebut sangat diperlukan Yogyakarta dan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

"Mendongeng menjadi bagian menuju Yogyakarta yang lebih baik," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Dian, Yogyakarta memiliki banyak sekali substansi yang bisa menjadi bahan mendongeng, seperti sejarah Candi Prambanan, Kraton Yogyakarta, tokoh Sultan Agung dan sebagainya. Jogja Mendongeng juga menjadi wahana para orangtua untuk be-

lajar mendongeng, dan direncanakan diadakan event serupa khusus untuk orangtua.

"Saya meyakini ketika orangtua pandai mendongeng, itu akan menurun ke anaknya juga pandai mendongeng, yang akhirnya semua tentang Jogja Istimewa tertransfer ke anaknya," katanya.

Apri Damai Sagita Krissandi selaku Kurator Dongeng mengatakan, dari peserta yang mendaftar Jogja Mendongeng mayoritas adalah anak-anak. Demikian juga lima peserta yang tampil mendongeng (karya terkurasi), empat di antaranya adalah anak-anak dan satu orang dewasa.

"Antusiasme anak-anak dan orangtua para pecinta/penikmat dongeng untuk

hadir melihat Jogja Mendongeng juga sangat tinggi sehingga kami terpaksa batasi melalui reservasi tiket," katanya.

Damai berharap kegiatan Jogja Mendongeng tidak selesai seiring usainya acara, tetapi mendongeng terus hadir di setiap keluarga di rumah. Maka ia membuat dua kesepakatan dengan anak-anak juga orangtua. Damai meminta setelah di rumah, anak-anak meminta kepada orangtuanya agar didongengi. Sedangkan bagi orangtua, ia meminta agar mau mendongeng bagi anak-anaknya. "Dongeng memiliki banyak manfaat dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak secara halus, tanpa menggurui anak. Kita semua adalah pendongeng," katanya.

Sambungan hal 1

Sejumlah

sekolah yang kosong, sistem akan menarik anak dari zona terdekat dari sisi jarak urutan (zona). Walaupun dalam realitanya juga tidak mudah. Pasalnya belum tentu anak tersebut mau sekolah di situ karena mungkin jaraknya masih jauh.

"Kondisi ini akan terus menjadi bahan

evaluasi. Salah satu evaluasinya ke depan mungkin harus mengurangi rombongan juga bisa. Karena setiap tahun mengalami kekurangan terus. Beberapa calon siswa yang masuk dan terdaftar ke sekolah itu sebelumnya sudah terlempar dari sekolah lain lantaran nilai atau jarak yang tidak memenuhi kriteria di sekolah pilihan

di atasnya," terangnya.

Didik menambahkan, secara umum pelaksanaan PPDB SMAN/SMKN di DIY cukup lancar. Meski saat awal penyelenggaraan sempat terjadi gangguan teknis, tapi bisa langsung diatasi sehingga tidak sampai berpengaruh signifikan terhadap jalannya PPDB.

Sambungan hal 1

Bank

Khususnya berkaitan dengan ketidakpastian arah penurunan Fed Fund Rate (FFR) AS, penentuan mata uang dolar AS secara global, dan masih tingginya ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina serta Kawasan Timur Tengah.

Dari faktor domestik, melemahnya Rp disebabkan oleh kenaikan permintaan valuta asing (valas) oleh korporasi serta persepsi pelaku ekonomi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.

Informasi dari Gubernur BI, dipastikan BI akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter termasuk peningkatan intervensi di pasar valas agar kurs Rupiah tidak melorot lebih dalam.

Di samping itu, juga dilakukan penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) (Kamis, 20/06/24).

Apakah upaya BI untuk menjaga kurs Rupiah agar tidak terdepresiasi lebih parah akan berhasil? Waktu yang akan membuktikan.

Seperti diketahui, melemahnya nilai tukar

Rupiah tersebut juga disebabkan oleh faktor yang tidak bisa dikontrol langsung oleh BI yaitu faktor eksternal tersebut di atas.

Dari faktor penyebab domestik, upaya yang dilakukan oleh BI akan lebih efektif jika didukung oleh pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga, BUMN, Perbankan, Korporasi dan sebagainya. Dalam hal ini, pemangku tidak melepas Rupiah yang dimiliki dengan membeli Dollar AS.

Melemahnya nilai tukar Rupiah tersebut jika terjadi berkepanjangan maka dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, khususnya import-inflasi. Seperti diketahui bahan baku Sebagian pangan dan pakan, seperti gandum, kedelai, jagung mayoritas masih diimpor.

Demikian pula sebagian bahan baku dan bahan setengah jadi produk industri pengolahan juga masih diimpor.

Kondisi tersebut cepat atau lambat akan mendorong naiknya harga-harga produk pangan dan industri pengolahan karena terjadinya dorongan kenaikan biaya produksi (cost push infation). Kondisi tersebut menjadikan tugas BI untuk menjaga stabilitas rupiah yaitu nilai tukar dan inflasi menjadi tidak mu-

ditangani.

Dalam hal menjaga inflasi, BI tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflai Daerah (TPID).

Dalam pengendalian inflasi, KPwBI DIY mengacu dari 3 pengalaman pembelajaran (lesson learned). Ketiganya termasuk adalah: (1) pentingnya penguatan produktivitas klaster pangan dengan menjalin sinergi bersama pemangku kepentingan yaitu Pemda, Kelompok Tani dan Akademisi. (2) Penguatan efisiensi proses bisnis untuk perluasan KAD BUMD-Klaster Pangan. (3) Upaya pengendalian tarif selain pangan, khususnya tarif yang menjadi kewenangan Pemda.

Ketiga lesson learned di atas, dalam implementasi strateginya tetap mengacu pada 4 K, yaitu: (1) keterjangkauan harga, (2) ketersediaan pasokan, (3) kelancaran distribusi, dan (4) komunikasi yang efektif. Jika TPIP/TPID berhasil menerapkan 4K dengan optimal seharusnya pengendalian inflasi menjadi lebih efektif. Selamat HUT BI ke-71!

(Penulis adalah Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY, Pengurus Pusat ISEI, Pengurus KADIN DIY dan Pengurus API DIY)-f

Sambungan hal 1

Tour

Dispar tidak membatasi pada klub motor tertentu. Syarat untuk mengikuti tur ini yakni peserta diwajibkan mengumpulkan fotokopi STNK dan SIM dan memakai kelengkapan berkendara selama tur," ungkap Zayid.

Dalam rutenya, para peserta akan disuguhkan hiburan dan makanan lokal setempat. Suasana ini akan menambah pengalaman peserta tur menikmati destinasi wisata.

"Jadi nanti makanannya juga makanan lokal yang ada di sekitar situ, jadi bukan makanan pesanan dari toko tapi makanan yang khas dari tempat-tempat yang disinggahi itu. Harapannya lewat acara ini, destinasi yang dijelajahi bisa terpromosikan. Salah satu tujuan utama ka-

mi kan memperkenalkan beberapa destinasi wisata yang selama ini belum dikenal oleh masyarakat melalui Tour De Merapi," tuturnya.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dispar Sleman Kus Endarto menambahkan, target peserta dalam acara ini dipatok pada 300 kendaraan. Namun hingga saat ini peserta yang mendaftar sudah mencapai angka 295 kendaraan.

Meski begitu, Dispar Sleman tetap membuka pendaftaran bagi masyarakat yang masih ingin berpartisipasi dalam tur.

"Peserta berkesempatan mendapatkan sejumlah doorprize dalam agenda ini. Adapun doorprize yang dibagikan di antaranya ada dua unit sepeda motor, enam sepeda gunung, peralatan dapur dan masih banyak," pungkasnya.

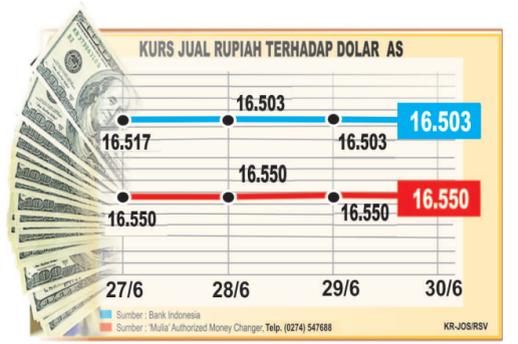
Sambungan hal 1

Hasto

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak perlu dicekal ke luar negeri karena bersikap kooperatif.

Sambungan hal 1

(Ant/Has)-f



Prakiraan Cuaca						Senin, 1 Juli 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban	
Bantul					22-30	65-95	
Sleman					22-29	65-95	
Wates					22-29	65-95	
Wonosari					22-30	65-95	
Yogyakarta					22-30	65-95	

Cerah Berawan Udaa Kabur Hujan Lokal Hujan Petir

Crafs : Arko

Muhammad Rudyanto Arief
Kepala Pusat Jaminan Mutu Universitas Amikom Yogyakarta

Kewajiban Pemenuhan Persyaratan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Meningkatkan Keamanan Informasi dalam Organisasi

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

dapat diakses oleh user yang berkepentingan terhadap layanan-layanan tersebut. Banyak pakar telah memberikan kajian terkait isu kegagalan keamanan informasi ini dari berbagai sudut pandang. Tentunya banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kegagalan keamanan informasi dalam sebuah organisasi.

Serangan ransomware seperti yang terjadi pada server pusat data nasional tentunya hanyalah puncak gunung es yang merupakan dampak dari proses-proses lainnya yang terjadi dalam sebuah organisasi baik yang sudah menerapkan kebijakan sistem keamanan informasi ataupun yang belum. Tidak ada jaminan bahwa ketika sebuah organisasi sudah menerapkan standar keamanan informasi, maka data atau informasi yang terdapat dalam organisasi tersebut akan otomatis menjadi aman dan bebas gangguan. Kepatuhan organisasi yang mengimplementasikan standar keamanan informasi terhadap persyaratan-persyaratan yang ada dalam standar merupakan hal yang wajib untuk diterapkan.

Saat ini terdapat banyak standar yang ditawarkan oleh industri terkait upaya pengamanan data atau informasi untuk organisasi. Terkait kegagalan keamanan informasi paling tidak terdapat 2 (dua) standar industri yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan keamanan data atau informasi, yaitu sistem manajemen keamanan informasi SNI ISO/IEC 27001 dan pedoman keamanan siber SNI ISO/IEC 27032.

Standar ini tentunya menyediakan pedoman bagi organisasi yang akan meningkatkan keamanan informasi secara terintegrasi dengan pendekatan holistik. Faktor-faktor yang mengakibatkan isu kegagalan keamanan informasi terjadi dapat saja disebabkan mulai dari tahap perencanaan ruang lingkup penerapan keamanan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sampai tahap evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahap penentuan ruang lingkup penerapan keamanan informasi mungkin saja tidak berdasarkan pada isu dan risiko proses bisnis dalam organisasi yang memang sesuai kebutuhan organisasi. Kadang organisasi dalam menentukan ruang lingkup proses bisnis yang akan di standarkan keamanan informasinya tidak berdasarkan hasil perhitungan risiko proses bisnis tapi hanya berdasarkan keinginan persyaratan pihak eksternal untuk keperluan pencitraan. Sehingga ruang lingkup proses bisnis yang akan di standarkan sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut.

Padahal pada klausul 4 SNI ISO/IEC 27001 mempersyaratkan organisasi ketika menentukan ruang lingkup penerapan proses bisnis yang akan di sertakan harus melihat isu-isu yang terkait konteks organisasi tersebut baik isu-isu internal maupun isu-isu eksternal. Karena sejak awal penentuan ruang lingkupnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka akan mengakibatkan persyaratan lainnya seperti komitmen manajemen di klausul 5 dan klausul lainnya menjadi tidak sesuai. Selain itu pada tahap evaluasi yaitu audit internal akan mengakibatkan proses audit internal yang dilakukan oleh auditor internal menjadi tidak tepat sasaran karena sebenarnya isu keamanan informasi yang di audit tidak sesuai dengan isu kebutuhan keamanan informasi organisasi akibat sejak awal ruang lingkup proses bisnis keamanan informasi yang di tetapkan tidak sesuai dengan profil kebutuhan keamanan informasi organisasi tersebut.

Karena tidak sesuai, maka hasil audit internal yang dapat saja berupa temuan-temuan audit menjadi temuan audit yang tidak tepat sasaran juga, apalagi rekomendasi temuan dan perbaikan yang di usulkan oleh auditor internal tidak ditindaklanjuti oleh pelaksana terkait keamanan organisasi didalam organisasi. Hal ini dapat disebabkan rendahnya komitmen dan kesadaran pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi. Klausul 5 pada SNI ISO/IEC 27001 mempersyaratkan pimpinan puncak dan pelaksana sistem manajemen

keamanan informasi untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi. Dukungan ini tentunya bukan hanya dengan komitmen saja, tetapi juga dengan menyediakan dukungan sumber daya yang sesuai terkait penyelenggaraan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Sumber daya tersebut dapat berupa ketersediaan dan kecukupan personel pelaksana, ketersediaan dan kecukupan anggaran keuangan, ketersediaan dan kecukupan peralatan dan mesin pendukung, ketersediaan dan kecukupan kebijakan dan prosedur pendukungnya. Itulah kenapa persyaratan dalam standar sistem manajemen keamanan informasi menjadi wajib untuk dipatuhi untuk meningkatkan keamanan informasi organisasi yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.

Muhammad Rudyanto Arief
Kepala Pusat Jaminan Mutu Universitas Amikom Yogyakarta

Kewajiban Pemenuhan Persyaratan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk Meningkatkan Keamanan Informasi dalam Organisasi

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

dapat diakses oleh user yang berkepentingan terhadap layanan-layanan tersebut. Banyak pakar telah memberikan kajian terkait isu kegagalan keamanan informasi ini dari berbagai sudut pandang. Tentunya banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kegagalan keamanan informasi dalam sebuah organisasi.

Serangan ransomware seperti yang terjadi pada server pusat data nasional tentunya hanyalah puncak gunung es yang merupakan dampak dari proses-proses lainnya yang terjadi dalam sebuah organisasi baik yang sudah menerapkan kebijakan sistem keamanan informasi ataupun yang belum. Tidak ada jaminan bahwa ketika sebuah organisasi sudah menerapkan standar keamanan informasi, maka data atau informasi yang terdapat dalam organisasi tersebut akan otomatis menjadi aman dan bebas gangguan. Kepatuhan organisasi yang mengimplementasikan standar keamanan informasi terhadap persyaratan-persyaratan yang ada dalam standar merupakan hal yang wajib untuk diterapkan.

Saat ini terdapat banyak standar yang ditawarkan oleh industri terkait upaya pengamanan data atau informasi untuk organisasi. Terkait kegagalan keamanan informasi paling tidak terdapat 2 (dua) standar industri yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan keamanan data atau informasi, yaitu sistem manajemen keamanan informasi SNI ISO/IEC 27001 dan pedoman keamanan siber SNI ISO/IEC 27032.

Standar ini tentunya menyediakan pedoman bagi organisasi yang akan meningkatkan keamanan informasi secara terintegrasi dengan pendekatan holistik. Faktor-faktor yang mengakibatkan isu kegagalan keamanan informasi terjadi dapat saja disebabkan mulai dari tahap perencanaan ruang lingkup penerapan keamanan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sampai tahap evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahap penentuan ruang lingkup penerapan keamanan informasi mungkin saja tidak berdasarkan pada isu dan risiko proses bisnis dalam organisasi yang memang sesuai kebutuhan organisasi. Kadang organisasi dalam menentukan ruang lingkup proses bisnis yang akan di standarkan keamanan informasinya tidak berdasarkan hasil perhitungan risiko proses bisnis tapi hanya berdasarkan keinginan persyaratan pihak eksternal untuk keperluan pencitraan. Sehingga ruang lingkup proses bisnis yang akan di standarkan sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut.

Padahal pada klausul 4 SNI ISO/IEC 27001 mempersyaratkan organisasi ketika menentukan ruang lingkup penerapan proses bisnis yang akan di sertakan harus melihat isu-isu yang terkait konteks organisasi tersebut baik isu-isu internal maupun isu-isu eksternal. Karena sejak awal penentuan ruang lingkupnya tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka akan mengakibatkan persyaratan lainnya seperti komitmen manajemen di klausul 5 dan klausul lainnya menjadi tidak sesuai. Selain itu pada tahap evaluasi yaitu audit internal akan mengakibatkan proses audit internal yang dilakukan oleh auditor internal menjadi tidak tepat sasaran karena sebenarnya isu keamanan informasi yang di audit tidak sesuai dengan isu kebutuhan keamanan informasi organisasi akibat sejak awal ruang lingkup proses bisnis keamanan informasi yang di tetapkan tidak sesuai dengan profil kebutuhan keamanan informasi organisasi tersebut.

Karena tidak sesuai, maka hasil audit internal yang dapat saja berupa temuan-temuan audit menjadi temuan audit yang tidak tepat sasaran juga, apalagi rekomendasi temuan dan perbaikan yang di usulkan oleh auditor internal tidak ditindaklanjuti oleh pelaksana terkait keamanan organisasi didalam organisasi. Hal ini dapat disebabkan rendahnya komitmen dan kesadaran pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi. Klausul 5 pada SNI ISO/IEC 27001 mempersyaratkan pimpinan puncak dan pelaksana sistem manajemen

keamanan informasi untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi. Dukungan ini tentunya bukan hanya dengan komitmen saja, tetapi juga dengan menyediakan dukungan sumber daya yang sesuai terkait penyelenggaraan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Sumber daya tersebut dapat berupa ketersediaan dan kecukupan personel pelaksana, ketersediaan dan kecukupan anggaran keuangan, ketersediaan dan kecukupan peralatan dan mesin pendukung, ketersediaan dan kecukupan kebijakan dan prosedur pendukungnya. Itulah kenapa persyaratan dalam standar sistem manajemen keamanan informasi menjadi wajib untuk dipatuhi untuk meningkatkan keamanan informasi organisasi yang menerapkan sistem manajemen keamanan informasi.